BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan teknologi yang pesat dan perkembangan usaha yang mengarah pada era globalisasi, mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat baik dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya dan aspek-aspek lainnya. Sehingga pemerintah berusaha mengembangkan segala aspek dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bandung. Hal tersebut terbentuk sehubungan dengan adanya perubahan paradigma penyelenggaraan kewenangan bidang pemerintahan yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dengan tujuan demokratis, pemberdayaan aparatur serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Perencanaan program kerja dari suatu instansi tidak terlepas dari aspek evaluasi kinerja periode sebelumnya. Hal ini merupakan tuntutan sistem perencanaan pembangunan daerah yang menyatakan bahwa evaluasi kinerja dijadikan bahan dari penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Kebijakan secara makro dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Bandung telah ditetapkan Rencana pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang harus diaplikasikan dan diimplementasikan kedalam Visi dan Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai bidang kewenangan sebagai mana di maksud dalam peraturan daerah Kota Bandung No. 2 Tahun 2001 tentang kewenagan otonom.

Berdasarkan program Rencana Pembangunan Jangka Panjang dengan Misi Kota Bandung yang berdaya saing dengan arah prioritas pembangunan yang mendukung pengembangan Bandung ekonomi kreatif dan pengembangan daya saing kota. Sedangkan kriteria program penunjang yang berkesinambungan dan menjadi agenda proritas sehingga tercapai tujuan bersama adalah:

1. Pengembangan ekonomi kreatif;
2. Pengembangan daya saing kota.

Program atau kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan tertuju pada pengembangan perekonomian kota yang berdaya saing dalam menunjang penciptaan lapangan kerja dan pelayanan publik serta meningkatkan peranan swasta dalam pembangunan ekonomi kota yang bertujuan memantapkan kemakmuran warga Bandung.

Anggaran pada suatu rencana kerja merupakan suatu evaluasi yang kontinyu, apabila terjadi suatu penyimpangan dapat segera dilakukan evaluasi yang kontinyu dan revisi sesuai dengan situasi yang sesungguhnya, sebab anggaran bersifat dinamis. Peranan atas penyusunan anggaran tersebut dapat memberikan informasi kepada bagian keuangan, kemudian data tersebut diolah

dan dianalisa untuk mengambil keputusan yang baik, bagian keuangan mengolah data dengan memperhatikan perkembangan ekonomi, sehingga dapat diketahui berapa besar peranan anggaran rencana kerja tersebut untuk pembangunan daerah.

Berdasarkan pernyataan dari Hj. Nia Wijayanti SE. (Kasubag Keuangan dan Program) fenomena yang terjadi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian Perdagangan yaitu pada saat penyusunan anggaran hanya dapat dilaksanakan dalam periode waktu tertentu dan memiliki masalah keterlambatan yang terjadi pada proses penyusunan, pengajuan dan pencairan anggaran yang disebabkan oleh terlambatnya penyerahan dokumen pertanggung jawaban dari setiap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengamati prosedur penyusunan anggaran rencana kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung dan hasil pengamatan tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan penelitian dengan judul : **"Tinjauan Atas Prosedur Penyusunan Anggaran Rencana Kerja (Studi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian Perdagangan)."**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pembahasan diatas penulis dapat mengidentifikasi masalah di dalam prosedur penyusunan anggaran rencana kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung adalah sebagai berikut :

Keterlambatan penyerahan dokumen pertanggung jawaban dari Pusat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan keterlambatan pencairan anggaran rencana kerja dari pemerintah Kota Bandung.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan di atas penulis merumuskan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penyusunan dan pengajuan anggaran rencana kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung.
2. Hambatan dan upaya dalam penyusunan dan pengajuan anggaran rencana kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian Perdagangan.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui informasi mengenai prosedur penyusunan anggaran rencana kerja pada Dinas

Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun melakukan penelitian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur penyusunan dan pengajuan anggaran rencana kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dihadapi dalam prosedur penyusunan dan pengajuan anggaran rencana kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung.

1.4 Kegunaan penelitian

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung, adapun manfaat tersebut bisa dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi Instansi

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berarti agar dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk meningkatkan kualitas instansi dan mengefektifkan penyusunan anggaran rencana kerja instansi.

2. Bagi Karyawan

   Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk memperbaiki kinerja kearah yang lebih baik

3. Bagi Pihak Lain

   Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan dalam menambah wawasan pengetahuan dan sebagai panduan bagi peneliti lain yang melakukan penelitian pada pembahasan yang sama.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Pengembangan ilmu

   Memberikan wawasan dan pengetahuan baru bagi ilmu akuntansi tentang proses pelaksanaan anggaran di bagian akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Daerah Kota Bandung.

2. Penulis

   a. Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memenuhi salah satu syarat ujian sidang guna menempuh gelar ahli madya ekonomi jurusan akuntansi .

   b. Memberikan wawasan dan tambahan pengetahuan mengenai prosedur penyusunan anggaran rencana kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung.

   c. Sebagai bahan latihan dan perbandingan secara langsung pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan dengan

kenyataan yang sebenarnya terjadi dilapangan kerja khususnya dalam prosedur penyusunan anggaran rencana kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Untuk Keperluan penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Dinas Koperasi, Usaha kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung Jl. Kawaluyaan No. 2 Soekarno-Hatta Kota Bandung.

1.5.2 Waktu Penelitian

Tabel 1.1
Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan Penelitian	Bulan						
		Feb 2011	Maret 2011	April 2011	Mei 2011	Juni 2011	Juli 2011	Agus 2011
I	Persiapan Penelitian							
	1. Permohonan Izin Penelitian							
	2. Realisasi Izin Penelitian							
	3. Penentuan Tempat Penelitian							
	4. Surat Peneriamaan dari Instansi							
II	Ujian Komprehensif							
III	Pelaksan aan Penelitian							
	1. Aktivitas Penelitian							
	2. Bimbingan Penelitian Pembimbing Instansi							
iV	Pelaporan Penelitian							
	1. Konsultasi dengan Dosem Penelitian							
	2. Bimbingan dengan Dosen Penelitian							
	3. Pembuatan Laporan Penelitian							
	4. Ujian Penelitian							
	5. Final Pembuatan Laporan Penelitian							
	6. Pengumpulan Laporan Penelitian							
	7. Sidang							